

**UPAYA REKONSILIASI ANTAR UMAT BERAGAMA
OLEH GEREJA INJILI DI TANAH JAWA (GITJ)
KARANG SUBUR**

TESIS



**OLEH
PB. PDT. SUHARTO, STH
NIM : 54070008**

**PROGRAM PASCA SARJANA FALKUTAS THEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
2010**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS DENGAN JUDUL :

**UPAYA REKONSILIASI ANTAR UMAT BERAGAMA
OLEH GEREJA INJILI DI TANAH JAWA (GITJ) KARANG SUBUR**

Telah dipertahankan oleh:

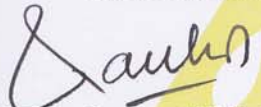
Nama : Pb. Pdt. Suharto, S.Th

NIM : 54070008

Dalam ujian tesis yang dilaksanakan oleh
Dewan Dosen Penguji Tesis Program Pasca Sarjana
Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik
Universitas Kristen Duta Wacana
Pada tanggal 30 Agustus 2010

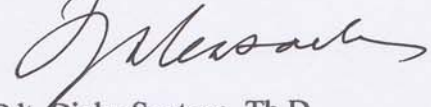
DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

PEMBIMBING II



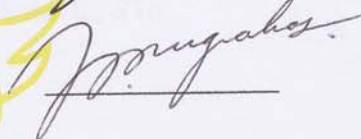
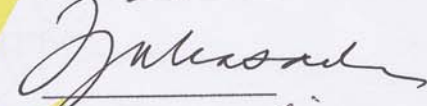
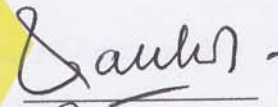
Pdt. Djaka Soetapa, Th.D

DOSEN PENGUJI TESIS

1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

2. Pdt. Djaka Soetapa, Th.D

3. Pratomo Nugroho Soetrana, MA



Disahkan Oleh
Direktur Pasca Sarjana
Program Studi Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik
Universitas Kristen Duta Wacana



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MA.PS, Ph.D

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pb. Pdt. Suharto, STh

NIM : 54070008

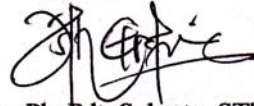
Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “UPAYA REKONSILIASI ANTAR UMAT BERAGAM OLEH GEREJA INJILI DI TANAH JAWA (GITJ) KARANG SUBUR”

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri. Apabila terbukti bahwa tesis saya tersebut merupakan salinan dari karya orang lain, maka saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan saya yang dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan sesadar-sadarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Agustus 2010

Penulis



Pb. Pdt. Suharto, STh



DAFTAR ISI

Judul dan Logo UKDW	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1. Masalah Kekerasan Agama.....	1
2. Gambaran Konflik Penutupan Gereja di Karang Subur.....	8
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Metodologi.....	12
F. Hipotesa Masalah.....	14
G. Sistematikan Pembahasan.....	15

BAB II DESKRIPSI GITJ KARANG SUBUR

A. Sejarah GITJ.....	16
1. Penginjilan DZV (Doopsgesinde Zending Vereeniging).....	16
1.1. Penginjilan DZV dengan Metode Baru.....	19
1.2. Penginjilan DZV lewat Kesehatan.....	20
1.3. Strategi Baru DZV dalam Pekabaran Injil.....	21
1.3.1. Perluasan Perceel.....	22
1.3.2. Pekabaran Injil di Kota-kota.....	22
2. Pekerjaan Penginjil Pribumi.....	23
2.1. Tunggul Wulung.....	23
2.2. Pasrah Noeriman.....	24
2.3. Pasrah Karso.....	25
3. Menjadi Gereja Dewasa.....	26
3.1. Proses Pendewasaan.....	27
3.2. Gereja Berdiri Sendiri.....	28
3.3. Dari GKD SM menjadi GITJ.....	31
B. GITJ Karang Subur di Semenanjung Muria.....	33
1. Kawasan Semenanjung Muria.....	34
1.1. Wilayah.....	34
1.2. Keadaan Sosial Politik.....	35
1.3. Agama dan Kepercayaan.....	38
2. Sejarah Berdirinya Jemaat Karang Subur.....	40
3. Deskripsi Wilayah Karang Subur.....	43
3.1. Geografis.....	43
3.2. Demografi.....	44
3.3. Agama dan Kepercayaan.....	44
3.4. Ekonomi.....	45
3.5. Sosial Budaya.....	45

BAB III KONFLIK DAN REKONSILIASI GITJ KARANG SUBUR	
A. Kronologi Konflik.....	46
1. Pra Konflik.....	46
2. Konfrontasi.....	51
3. Krisis.....	52
4. Akibat.....	53
5. Pasca Konflik.....	53
B. Analisa Konflik.....	54
C. Upaya Pengurus Gereja dalam Rekonsiliasi.....	60
1. Pendekatan Melalui Pemerintah.....	60
2. Pendekatan Dialog antar Tokoh Agama.....	63
3. Pendekatan Sosial Masyarakat.....	68
D. Rekonsiliasi: Ramadhan dan Idul Fitri.....	70
E. Kesimpulan.....	73
BAB IV TINJAUAN REKONSILIASI DI GITJ KARANG SUBUR	
A. Pengampunan dan Rekonsiliasi.....	75
1. Pengampunan dalam Perspektif Islam.....	80
1.1. Memaafkan dan Mengampuni.....	80
1.2. Berlapang Dada.....	82
2. Pengampunan dalam Perspektif Kristen.....	85
2.1. Pertobatan Aspek Penting dari Pengampunan.....	87
2.2. Diampuni dan Mengampuni.....	88
B. Dukungan Pihak Ketiga yang Netral.....	90
C. Komitmen untuk Rekonsiliasi.....	92
D. Transformasi Jangka Panjang.....	98
1. Transformasi Konflik untuk Konflik Struktural.....	99
2. Transformasi Konflik untuk Frustrasi.....	103
3. Transformasi Konflik untuk Konflik Aktor Elementer.....	105
4. Transformasi Konflik Otonom.....	107
E. Kesimpulan.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Langkah Positif.....	112
B. Harapan ke Depan.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	125

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bahwasanya kasih setia-Nya selama-lamanya. Atas kasih karunia-Nya yang melimpah dan kekuatan-Nya yang telah memberkati penulis, memimpin, membimbing serta memberikan kekuatan dan dorongan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Pasca Sarjana Fakultas Theologia Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik di Universitas Kristen Duta Wacana. Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan kemampuan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D sebagai direktur fakultas Theologia yang senantiasa memberikan semangat untuk belajar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D sebagai direktur program studi Pasca Sarjana Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik yang telah mengajar dan memberikan teladan dan kedisiplinan dalam penganalisaan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D dan Pdt. Djaka Soetapa, Th.D sebagai Dosen Pembimbing yang dengan setia membimbing, mengarahkan, mengerokesi serta menganalisa tesis hingga selesai. Penulis mengucapkan kepada Bp. Pratomo Nugroho Soetrana, MA selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan koreksi terhadap tesis ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada isteri tercinta SRI SULISTYANINGSIH A.MA.PD dan anakku sayang YEHEZKIEL ABDI DHARMA yang senantiasa menemani, memotivasi, memperhatikan serta mendoakan dalam penyelesaian studi pasca sarjana di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Terima kasih juga buat rekan-rekan angkatan pertama (2007/2008) di studi program Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik, Pdm Budi, Pdt. Sumihar, Pdt. Wiji, Pdt. Madar, Sagoh, Iswantara, Kuriake, Ade, yang selalu kompak dan penuh sukacita, kesempatan ini mungkin tidak akan ada lagi.

Akhirnya penulis berharap bahwa saran dan kritik dalam penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang masih diperbaiki. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Tuhan Yesus Kristus.

Yogyakarta, 30 Agustus 2010
Penulis

ABSTRAKSI

Disadari atau tidak, konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Indonesia dapat disimpulkan lebih dominan berakar struktural. Terutama bersumber pada faktor ketidakadilan sosial dan kegagalan mengelola potensi kemajemukan di berbagai daerah. Memahami konflik antar umat beragama di Karang Subur terjadi karena adanya disharmonisasi sosial dalam komunitas dan tumbuhnya fanatisme dan eksklusifisme di kalangan umat beragama serta ketidakpedulian terhadap masalah sosial. Akumulasi konflik yang tidak dirasa seperti rumput kering yang siap dibakar, penutupan tempat ibadah umat Kristen di Karang Subur merupakan puncak konflik. Konflik terjadi disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yaitu fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi. Konflik bukanlah pertanda kegagalan, melainkan kesempatan dan bahaya. Konflik menjadi kesempatan jika dapat dikelola dan menjadi bahaya jika tidak dikelola dan meningkat menjadi kekerasan. Dengan demikian konflik pada hakekatnya adalah tentang kehidupan, yang menunjuk langsung pada kontradiksi-kontradiksi sebagai pencipta kehidupan dan penghancur kehidupan. Jika konflik penting bagi kehidupan, maka kehidupan penting bagi konflik karena konflik memiliki sifat-sifat seperti kehidupan dan siklus yang hidup. Bagaimanakah umat Kristen di Karang Subur mengatasi masalah tersebut? Berbagai pendekatan dilakukan oleh mereka dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Upaya mereka membuahkan hasil. Rekonsiliasi dapat tercapai. Rekonsiliasi merupakan awal dari sebuah gerakan kerukunan dan perdamaian yang dinamis, sekaligus sebagai akhir dari sebuah proses perpecahan internal masyarakat. Sebagai sebuah gerakan menunjukkan bahwa terdapat visi dan misi yang akan dicapai yang tentu saja bermuara dari moralitas dan etika yang disepakati oleh pelaku rekonsiliasi. Upaya dalam kerja membangun perdamaian mengarah pada perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukan semata ketiadaan perang. Tetapi mengacu pada keadaan yang dinamis dan partisipatif yang berdasar pada nilai-nilai universal di segala level praktis kehidupan. Perdamaian harus mampu diciptakan dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Damai jangka panjang atau yang lazim disebut damai positif memiliki ciri tertentu. Diantara cirinya yang menonjol yaitu keadilan, kepercayaan, empati, serta menekankan kerjasama dan dialog. Disinilah kajian penulis menganalisa rekonsiliasi antar umat beragama di Karang Subur. Bagaimanakah proses rekonsiliasinya dan mengapa bisa terjadi? Rekonsiliasi dapat terwujud oleh karena di masing-masing pihak baik umat Kristen maupun Islam saling memberi pengampunan dan pemaafan; adanya kejujuran keterbukaan batin dan berlapang dada; serta ada tindakan konkret dalam sikap sesuai apa yang ada dalam batin mereka. Pengampunan membawa pihak-pihak yang terluka untuk dipulihkan, melepaskan masa lalu yang menyakitkan serta membangun kembali suatu hubungan. Memulihkan yang terluka dengan sikap mengasihi berarti menganggap orang itu lebih berarti dan berharga, tanpa melihat kesalahannya. pengampunan dan rekonsiliasi yang mempunyai empat elemen penting: (1) penilaian moral, (2) penolakan upaya balas dendam, (3) empati, (4) rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak. Rekonsiliasi adalah pemulihan harkat kemanusiaan yang telah dirusakkan oleh peristiwa-peristiwa traumatis dan sebuah proses merekonstruksi tatanan moral dari sebuah masyarakat.

ABSTRAKSI

Disadari atau tidak, konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Indonesia dapat disimpulkan lebih dominan berakar struktural. Terutama bersumber pada faktor ketidakadilan sosial dan kegagalan mengelola potensi kemajemukan di berbagai daerah. Memahami konflik antar umat beragama di Karang Subur terjadi karena adanya disharmonisasi sosial dalam komunitas dan tumbuhnya fanatisme dan eksklusifisme di kalangan umat beragama serta ketidakpedulian terhadap masalah sosial. Akumulasi konflik yang tidak dirasa seperti rumput kering yang siap dibakar, penutupan tempat ibadah umat Kristen di Karang Subur merupakan puncak konflik. Konflik terjadi disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yaitu fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi. Konflik bukanlah pertanda kegagalan, melainkan kesempatan dan bahaya. Konflik menjadi kesempatan jika dapat dikelola dan menjadi bahaya jika tidak dikelola dan meningkat menjadi kekerasan. Dengan demikian konflik pada hakekatnya adalah tentang kehidupan, yang menunjuk langsung pada kontradiksi-kontradiksi sebagai pencipta kehidupan dan penghancur kehidupan. Jika konflik penting bagi kehidupan, maka kehidupan penting bagi konflik karena konflik memiliki sifat-sifat seperti kehidupan dan siklus yang hidup. Bagaimanakah umat Kristen di Karang Subur mengatasi masalah tersebut? Berbagai pendekatan dilakukan oleh mereka dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Upaya mereka membuahkan hasil. Rekonsiliasi dapat tercapai. Rekonsiliasi merupakan awal dari sebuah gerakan kerukunan dan perdamaian yang dinamis, sekaligus sebagai akhir dari sebuah proses perpecahan internal masyarakat. Sebagai sebuah gerakan menunjukkan bahwa terdapat visi dan misi yang akan dicapai yang tentu saja bermuara dari moralitas dan etika yang disepakati oleh pelaku rekonsiliasi. Upaya dalam kerja membangun perdamaian mengarah pada perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukan semata ketiadaan perang. Tetapi mengacu pada keadaan yang dinamis dan partisipatif yang berdasar pada nilai-nilai universal di segala level praktis kehidupan. Perdamaian harus mampu diciptakan dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Damai jangka panjang atau yang lazim disebut damai positif memiliki ciri tertentu. Diantara cirinya yang menonjol yaitu keadilan, kepercayaan, empati, serta menekankan kerjasama dan dialog. Disinilah kajian penulis menganalisa rekonsiliasi antar umat beragama di Karang Subur. Bagaimanakah proses rekonsiliasinya dan mengapa bisa terjadi? Rekonsiliasi dapat terwujud oleh karena di masing-masing pihak baik umat Kristen maupun Islam saling memberi pengampunan dan pemaafan; adanya kejujuran keterbukaan batin dan berlapang dada; serta ada tindakan konkret dalam sikap sesuai apa yang ada dalam batin mereka. Pengampunan membawa pihak-pihak yang terluka untuk dipulihkan, melepaskan masa lalu yang menyakitkan serta membangun kembali suatu hubungan. Memulihkan yang terluka dengan sikap mengasihi berarti menganggap orang itu lebih berarti dan berharga, tanpa melihat kesalahannya. pengampunan dan rekonsiliasi yang mempunyai empat elemen penting: (1) penilaian moral, (2) penolakan upaya balas dendam, (3) empati, (4) rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak. Rekonsiliasi adalah pemulihan harkat kemanusiaan yang telah dirusakkan oleh peristiwa-peristiwa traumatis dan sebuah proses merekonstruksi tatanan moral dari sebuah masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

1. Masalah Kekerasan Agama

Dahulu, Indonesia merupakan sebuah negara yang aman dan damai. Orang-orang dari berbagai agama yang berbeda dapat hidup bersama dengan rukun. Dari berbagai agama yang berbeda dapat hidup bersama dengan rukun. Mereka dapat hidup berdampingan saling menghargai, menolong dan berbagi rasa. Semuanya dapat berjalan secara normal. Walaupun demikian bukan berarti tidak ada perselisihan dan konflik. Meskipun tidak seluruh masyarakat Indonesia menyadari bahwa kepelbagaian dalam agama adalah anugerah dan kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia.

Belakangan ini, masyarakat agamawi di Indonesia mengalami kesulitan untuk berhubungan seorang terhadap dengan yang lain. Sebagai bagian dari fenomena global, di Indonesia, politik identitas terasa semakin terang benderang terutama sejak kejatuhan rejim Soeharto pada bulan Mei 1998.¹ Setidaknya, bangkitnya kembali politik identitas ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama, pertama, terjadinya kerusuhan antar etnis di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Kupang. Kedua, terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Ketapang, Mataram, Kupang, serta Maluku.

¹Ulil Abshar Abdala, *Ekologi Konflik Agama-Agama di Indonesia: Menuju Rekonsiliasi atau Konflik Berkepanjangan*, dalam dalam Einar M Sitompul, *Agama-Agama Kekerasan dan Perdamaian*, Marturia PGI, Jakarta, 2005, halaman 36.

Persoalan identitas ini merupakan persoalan masa kini, yaitu persoalan era posmo. Sebelum era posmo, identitas bukan persoalan yang penting, sebab era sebelum posmo adalah suatu era dimana identitas kalau tidak diabaikan ya ditekan. Kalau sejarah umat manusia dapat di bagi dalam 3 era, yaitu era pra-modern, era modern, dan era posmodern, maka era pra-modern ditandai oleh diabaikannya identitas, sebab pada waktu itu imperium-imperium di seluruh dunia mempunyai konsep “orang pusat yang beradab” dan “orang pinggiran yang biadab/barbar”. Pada masa ini, identitas tidak menjadi persoalan, karena yang dipentingkan adalah menjadi warga suatu imperium yang beradab dan bukan identitas diri. Orang-orang pinggiran yang baidab, cepat atau lambat pasti akan menjadi warga imperium (mentalitas imperium ini menjangkiti imperium Roma, China, dan Kekristenan di abad pertengahan²). Ketika abad pertengahan berakhir, segera muncul era modern, yang dimulai dengan Renaisans, berlanjut dengan Enligntenment. Ciri era modern adalah berpikir secara ideologis, artinya tidak mengijinkan adanya perbedaan. Pada era inilah muncul sebuah konsep tentang *nation state* yang sangat ideologis, sehingga tidak mengijinkan adanya perbedaan-perbedaan masyarakat.³ Sehingga pada tahun 1980an, era modern digugat, dan muncullah era posmo, yaitu suatu era yang sangat mementingkan identitas yang mengalami represi selama era modern. Demikianlah, maka era posmo diwarnai oleh perjuangan akan identitas dimana-,mana,⁴ bahkan

² Emanuel Gerrit Singgih menamai mentalitas imperium ini dengan naive realism – lihat Emanuel Gerrit Singgih, “Globalization and Contextualization: Toward a New Awareness of Ones’s Own Reality”, dalam Sientje Merentek-Abram, *Doing Theology in Indonesia: Sketches for An Indonesian Contextual Theology*, ATESEA, Occasional Paper No. 14, Manila, 2003, hal. 121-128.

³Pembahasan secara luas dan mendalam mengenai ciri-ciri era dari pra-modern ke modern dank e posmo (dari sudut pandang filsafat) dengan ciri khas masing-masing, lihat Leela Gandhi, *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, Columbia University Press, New York, 1998, halaman 23-54; pembahasan dari sudut politik lihat Lynn H. Miller, *Global Order, Values and Power in Interational Politics*, Colorado, Westview, 1998, halaman 22-23; proses dari kekacauan Renaissance sampai ditemukannya faktor pemersatu umat manusia dalam rasionalitas telah digambarkan oleh Stephen Toulmin dengan sangat bagus, lihat Stephen Toulmin, *Cosmopolis, The Hidden Agenda of Modernity*, New York: The Free Press, 1990, hal. 45-87.

⁴Mengenai pentingnya wacana tentang identitas di era posmo ini, lihat Kathryn Woodward, “Introduction”, dalam Kathrin Woodward (penyunting), *Identity and Defference*, Sage Publications,

masalah identitas adalah masalah hidup mati,⁵ sehingga menimbulkan benturan-benturan sosial antar entitas yang berbeda dengan identitasnya.⁶ Perjuangan tentang identitas dimana-mana, entah itu identitas budaya, etnis, agama, jender, orintasi seksual atau bahkan identitas individual. Perjuangan identitas tersebut muncul berhubung terjadi krisis identitas dimana-mana. Sedangkan krisis identitas terjadi karena faktor pemersatu tiap pluralitas dimana-mana sedang digugat. Perjuangan inilah yang menimbulkan bentrokan identitas dimana-mana, karena memang manusia tidak terbiasa dengan berpikir secara pluralistik. Dengan demikian ada beberapa bentuk kekerasan politik agama yang terjadi di Indonesia. Pertama, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti Gereja dan Mesjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma maupun terbunuh. Bentuk kekerasan yang kedua adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan simiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama. Pelaku tindakan kekerasan agama secara potensial bisa berasal dari setiap kelompok agama di Indonesia. Dalam hal ini Jack D. Douglas dan Frances Chaput⁷ memberikan istilah kekerasan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kepada orang lain.

Namun, belajar dari kasus-kasus yang muncul di Ketapang, Maluku, Poso, Mataram serta Kupang maka bisa ditemukan sebuah kecenderungan bahwasanya

London, 1997, halaman 1-6; juga Kathrin Woodward (penyunting), *“Concept of Identity and Defference,”* dalam Kathrin Woodward (penyunting), *Identity and Defference*, Sage Publications, London, 1997, halaman 8-50,

⁵Meminjam istilah dari Emanuel Gerrit Singgih, *Iman & Politik Dalam era Reformasi di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2001, halaman 1.

⁶Menurut saya, buku *Benturan antar Peradaban* dari Samuel Huntington adalah benturan antar identitas pada tingkatan peradaban. Peradaban, menurut Huntington, adalah bentuk yang lebih luas dari kebudayaan, atau dengan kata lain suatu ikatan antar kebudayaan yang sejenis-lihat Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Qalam, Yogyakarta, 2001, halaman 3-72, judul asli: *“The Clash and the Remaking of World Order*, 1996, diterjemahkan oleh: M. Sadat Ismail.

⁷Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, *Kekerasan*, dalam Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesi, Jakarta, 2002. halaman 11

sebagian besar kekerasan agama yang timbul akibat konflik yang terjadi antara komunitas Islam dan komunitas Kristen. Di Maluku, misalnya, komunitas Islam dan Kristen teridentifikasi melalui ikat kepala dan identitas nama kelompok yang bertikai antara kelompok merah (obet) dan kelompok putih (acang). Apalagi diakhir-akhir ini, konflik dan aksi-aksi kekerasan atas nama agama semakin marak dimana-mana. Mulai dari kasus Bom Bali, Bom Hotel JW Marriot, Bom Kuningan, penyerbuan Kampus Al-Mubarak, Ahmadiyah di Parung Jawa Barat.

Berangkat dari peristiwa-peristiwa diatas, merupakan penyulut yang terus merembet pada perlakuan menolak, mendemo, menutup dan merusak tempat ibadah Kristiani. Penutupan tempat ibadah merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Apalagi berbagai alasan yang dilontarkan oleh pihak lain yang menentang dalam penutupan tempat ibadah tersebut. Tidak hanya ditutup tetapi juga dirusak dan dibakar.⁸

Kejadian penutupan tempat diatas sebetulnya hanya penggalan dan bentuk lain dari hubungan toleransi beragama yang diusung orde baru. Pemerintah memang berusaha menjamin kebebasan beragama dengan seperangkat peraturan, tetapi disisi lain dalam mengkampanyekan toleransi umat beragama, ternyata ada banyak kejadian peristiwa kekerasan agama yang terjadi. Kebebasan untuk menjalankan ibadah secara formal sudah dijamin oleh negara, tetapi melihat bahwa telah terjadi penutupan Gereja atau tempat ibadah lain baik oleh sekelompok penentang, apa jaminannya? Seperti yang dilaporkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Undang-undang Dasar memberikan kepada "semua orang," hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing" dan menyatakan bahwa Negara adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pemerintah secara umum menghormati kebebasan beragama; namun pembatasan – pembatasan tetap ada terhadap beberapa jenis kegiatan keagamaan dan agama-agama yang tidak diakui. Sebagai tambahan, pihak

⁸A.A Yewangoe, *Kekerasan Struktur dan Kultur Serta Akibat-Akibatnya*, dalam Einar M Sitompul, *Agama-Agama Kekerasan dan Perdamaian*, Marturia PGI, Jakarta, 2005, halaman 29.

keamanan adakalanya mentolelir diskriminasi dan tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok keagamaan oleh para oknum dan pemerintah terkadang gagal menghukum para pelakunya.⁹

Lebih lanjut laporan ini dengan tegas mengkritisi kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi kebebasan umat beragama di Indonesia. Hal ini juga senada apa yang disampaikan oleh Mh Nurul Huda adalah

Walaupun Pemerintah telah melakukan usaha yang cukup signifikan untuk mengurangi peristiwa kekerasan antar agama, kekerasan tersebut masih terjadi sepanjang periode yang dicakup oleh laporan ini. Pada beberapa kesempatan, Pemerintah mentolelir kekerasan terhadap kebebasan beragama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pribadi atau gagal menghukum para pelaku kejahatan.¹⁰

Kebebasan untuk menjalankan ibadah secara formal sudah dijamin oleh Negara, tetapi melihat bahwa telah terjadinya penutupan gereja atau tempat ibadah lain baik sekelompok penentang maupun oleh polisi juga sering dilakukan adalah sesuatu yang membingungkan umat. Penodaan terhadap hakikat dasar kehidupan manusia, menjadi bertambah lengkap, karena tidak hanya masyarakat sipil yang menjadi pelaku atas pelanggaran tersebut. Negara, sebuah institusi yang semestinya berperan sebagai katalisator bagi terjaminnya kebebasan berekspresi, beragama dan berkeyakinan, justru berada dibalik semua segala bentuk kekerasan yang berkecamuk, terutama terhadap kelompok minoritas.

Tugas negara, kata Robert Mclver dalam karya klasiknya “The Modern State” adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menuju satu tatanan hidup yang lebih baik.¹¹ Untuk itu, negara bertanggungjawab terhadap semua pelayanan publik agar memenuhi standar kesejahteraan warganya. Konsep *welfare state* karenanya bisa dimengerti sebagai pelembagaan dari tanggungjawab formal dari masyarakat terhadap

⁹Mh. Nurul Huda, *Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2005* (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat). Di keluarkan oleh Kantor Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh. Diterbitkan pada tanggal 8 November 2005, <http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/29/laporan-kebebasan-beragama-internasional-2005/>.

¹⁰Ibid.

¹¹ Robert Macclver, *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1950, hal. 3-24.

pemenuhan kesejahteraan dari anggota-anggotanya.¹² Pemenuhan terhadap aspek ini, merupakan tugas mendasar yang mesti diemban oleh institusi negara. Peran utama yang mesti dilakukan negara adalah kewajibannya untuk melindungi hak asasi kemanusiaan masyarakatnya. Negara harus menjamin hak warganya untuk hidup, berserikat, berkumpul, berekspresi, mendapat pendidikan, pekerjaan serta hak menjalankan keyakinannya.

Pada satu sisi umat beragama mempunyai keinginan untuk menjalankan ibadahnya sebagai kebutuhan rohaninya sebagai umat beragama. Tetapi pada sisi lain kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan agama lainnya. Pada titik inilah timbul atau muncul konflik ketika dua pihak atau lebih menganggap adanya perbedaan posisi yang tidak selaras; tidak cukup sumber dan atau tindakan satu pihak menghalangi, mencampuri atau cara lain untuk membuat tujuan pihak lain kurang sukses.¹³

Relasi agama yang tidak hanya dengan perdamaian, tetapi juga kekerasan sangatlah sulit untuk ditolak manakala menyaksikan bahwa agama seringkali digunakan sebagai landasan ideologis dan pembenaran simbolis bagi tindak kekerasan yang dilakukan sebagian umat beragama.

Menurut Haryatmoko¹⁴ setidaknya ada 3 alasan mengapa agama memiliki kemungkinan untuk dijadikan landasan dan pembenaran tindak kekerasan. *Pertama*, adalah karena fungsi agama sebagai ideologi. Dalam fungsi ini agama kemudian menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan relasi antar manusia, yakni sejauh mana tatanan sosial di anggap sebagai

¹² Karakteristik negara kesejahteraan menurut Haryatmoko dengan mengutip Marciano Vidal terdiri empat hal. Pertama, komitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menampung angkatan kerja aktif. Kedua, adanya asuransi sosial yang berlaku untuk warga negara dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Ketiga, adanya jaminan pendidikan bagi rakyat. Keempat, kebijakan sosial yang dipahami sebagai redistribusi kekayaan dan tidak hanya menjadi obat bagi kesenjangan sosial. Haryatmoko, *Telaah Historis Negara Kesejahteraan, Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No 3: 1998, hal.41.

¹³ Duane Ruth Heffebower, *Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi*, Edisi II, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

¹⁴ Haryatmoko, *Agama: Etika Atasi Kekerasan*, dalam *Harian Kompas*, edisi 17 April 2000. halaman 14.

representasi religius, yang dikehendaki Tuhan. Lebih jauh fungsi perekat ini, disisi lain juga bisa menghasilkan banyak kontradiksi terutama menyangkut masalah ketidakadilan dan kesenjangan yang selalu menjadi topik yang panas dan acapkali melahirkan tindak kekerasan. *Kedua*, adalah fungsi agama yang juga sebagai faktor identitas. Agama secara spesifik dapat di identikkan kepemilikannya pada manusia atau kelompok manusia tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas, status, pandangan hidup, cara berpikir, etos dan sebagainya. Hal ini lebih mengkristal lagi bila dikaitkan dengan identitas lainnya seperti seksual (jenis kelamin), etnis (kesukuan), bangsa dan sebagainya. Pertentangan etnis, kelompok, bangsa dan sebagainya sangat mungkin melahirkan kekerasan dan di sini agama sangat mungkin untuk turut diikutsertakan juga. *Ketiga*, fungsi agama sebagai legitimasi etnis hubungan antar manusia. Berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran, mekanisme ini bukan sakralisasi hubungan antar manusia, tetapi suatu hubungan antar manusia yang mendapat dukungan dan legitimasi dari agama. Padahal orang tahu, di dunia apalagi dunia ketiga, ekonomi pasar sangat akomodatif terhadap rezim anti-demokrasi, yakni represif terhadap gerakan kesetaraan dan biang dari kekerasan struktural.¹⁵ Dengan demikian potensi agama untuk diikut sertakan dalam tindak kekerasan sebagai 'landasan dan legitimasi' menjadi sangat memungkinkan. Sehingga penutupan tempat ibadah secara paksa pun bisa terjadi.

Fenomena di atas melahirkan wacana agama yang paradoksal bahwa ia tidak hanya bersifat rahmatan lil alamin (rahmat bagi semua) tapi juga bencana, karena melahirkan fenomena-fenomena kekerasan. Meskipun terdapat banyak pernyataan apologetis (pembelaan diri), khususnya dari kalangan agamawan, bahwa agama secara esensial hanya mengajarkan perdamaian dan menentang kekerasan; tetapi manusia

¹⁵Oleh Suratno, tulisan ini telah dimuat di Jurnal Falsafah dan Agama, Edisi: Agama dan Kekerasan, Vol. 1, No. 1, April 2007, Jakarta: PS Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, halaman 86.

saja yang kemudian menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi/kelompok sehingga menyulut kekerasan, yang jelas fenomena aksi kekerasan atas nama agama secara nyata terjadi dalam kehidupan.

2. Gambaran Konflik Penutupan Gereja di GITJ Karang Subur

Di kabupaten Kudus pun tidak luput dari peristiwa tersebut. Tidak sedikit gereja yang berdiri di Kabupaten Kudus mengalami intimidasi dan ancaman dari sekelompok militan Islam dalam bentuk teror. Sehingga mengusik kenyamanan umat Kristen dalam menjalankan ibadahnya maupun eksistensinya sebagai umat beragama. Ada beberapa kasus peristiwa penutupan tempat ibadah umat Kristen di kabupaten Kudus. Berknaan dengan konflik yang terjadi, penulis menganalisa dan memfokuskan konflik penutupan dan pelarangan beribadah di gereja GITJ Karang Subur Kabupaten Kudus.

Sama halnya yang terjadi di GITJ Karang Subur Kabupaten Kudus, punya nasib yang sama. Tempat ibadah mereka pun ditutup dan dilarang tidak boleh digunakan lagi untuk beribadah di hari minggu secara paksa. Tetapi sebelumnya mereka beribadah di gereja dan melakukan aktifitas kegiatan gereja dalam gedung gereja dengan nyaman tanpa ada pelarangan maupun penutupan tempat ibadah.

Gereja GITJ Tanjungrejo Kudus, sebagai gereja dewasa dalam menjalankan program pelayanannya mempunyai cabang/pepanthan atau pos pelayanan. Salah satu program yang dilakukan oleh gereja adalah penginjilan. Melalui pelayanan penginjilan pada tahun 1960an, berdirilah pos pelayanan di daerah Karang Subur. Sehingga jemaat makin bertambah secara signifikan kemudian gereja induk mendirikan gereja cabang atau pepanthan di Karang Subur. Pada awalnya memang belum ada masalah atau konflik saat gereja berdiri di daerah Karang Subur. Pada tahun 1980an, ada masalah yang muncul yang tidak diketahui sebab permasalahan sehingga berdampak

pada penutupan dan pelarangan untuk beribadah di gereja. Atas persoalan yang terjadi, baik pengurus maupun warga melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar daerah Karang Subur. Alhasil tempat ibadah dapat dipergunakan lagi untuk beribadah. Dengan adanya pendekatan kepada warga sekitar daerah itu dimana gereja GITJ Karang Subur tersebut berdiri, sehingga baik pengurus gereja maupun jemaat dalam kehidupan sehari-hari membaur atau bersosial dengan masyarakat setempat. Sehingga apapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh warga Karang Subur, warga Kristen selalu mengikuti dan melaksanakan.

Pada tahun 1990an, ada upaya lagi untuk menutup gereja dan melarang untuk beribadah di gereja, karena ada beberapa warga dan tokoh agama Muslim tidak menghendaki Kekristenan ada di daerah tersebut.¹⁶ Akan tetapi usaha tersebut gagal dan gereja tetap dipakai sebagai tempat ibadah lagi. Pada tahun 2005, berawal pada sebuah acara komisi wanita tingkat Klasis yang dilaksanakan di GITJ Karang Subur pada bulan April 2005. Gereja ditutup total selama kurang lebih 8 bulan.

Berawal dari ibadah pertemuan ibu-ibu GITJ se Klasis Selatan di GITJ Karang Subur pempangan dari GITJ Tanjungrejo berakibat pada penutupan gereja. Selang beberapa hari dari acara tersebut secara spontan warga Islam setempat mendemo dan menuntut agar tempat ibadah ditutup dan dilarang tidak boleh digunakan lagi untuk beribadah. Pengurus gereja setempat terkejut atas persoalan tersebut karena sebelumnya mereka pun sudah memberitahukan kepada masyarakat setempat bahwa gereja GITJ Karang Subur mengadakan acara dari Klasis tersebut. Tanpa disadari oleh pengurus dan jemaat ketika hari minggu saat ibadah, tiba-tiba gereja tersebut di datangi oleh beberapa warga setempat memberikan surat dan mengatakan orang

¹⁶ Menurut Bp. Adi Waluyo maupun Bp. Suwarno mengatakan bahwa memang mereka yang menutup tempat ibadah tidak menerima atau tidak mau adanya perbedaan. Ungkapan ini secara langsung diterima oleh bp. Adi Waluyo dan Bp. Suwarno saat bertemu dengan mereka yang menutup Gereja untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Wawancara pada tanggal 5 Juni 2009.

Kristen tidak boleh beribadah lagi di gereja, itulah bentuk dari intimidasi dari mereka saat itu. Berkaitan dengan konflik tersebut pengurus gereja menanyakan ke pihak-pihak yang terkait misalnya dengan Kepala Desa namun masalah belum bisa diselesaikan. Pengurus berusaha meminta bantuan berkenaan konflik yang dialaminya mereka datang ke Camat dan Bupati namun hasilnya juga nihil karena pihak Islam menghendaki dengan keras dilarang untuk tidak beribadah di gereja.

Usaha yang telah diupayakan dan berbagai cara yang telah ditempuh oleh pengurus gereja menthok (jalan buntu). Alhasil warga gereja tetap dilarang untuk memakai gedung gereja sebagai tempat ibadah. Namun warga gereja tetap beribadah disekitar gedung yang ditutup dan mereka beribadah di luar gedung gereja. Mereka beribadah diluar gereja selama kurang lebih delapan bulan. Walaupun jemaat GITJ Karang Subur dilarang untuk menggunakan gereja sebagai tempat ibadahnya, mereka tetap melakukan kegiatan gereja dirumah-rumah jemaat.

Beberapa bulan mereka tidak beribadah digereja, tetapi juga pengurus jemaat terus berusaha supaya gereja bisa digunakan lagi untuk beribadah. Pengurus gereja melakukan pendekatan-pendekatan dengan para pemimpin tokoh agama dan masyarakat di desa tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh pengurus gereja melalui silahturohmi dan dialog dengan tokoh-tokoh agama muslim dan tokoh masyarakat yang masih terkait dalam konflik. Upaya tersebut membuahkan hasil walaupun masih belum memuaskan paling tidak membuka celah untuk mereka dapat beribadah lagi di gereja. Dalam kunjungan tersebut tidak hanya dihari-hari biasa pengurus jemaat melakukan pendekatan tetapi juga ketika di hari Idul Fitri pengurus Gereja pun bersilahturohmi disetiap tokoh-tokoh Agama dan tokoh masyarakat dan juga masyarakat sekitar di wilayah desa Karang Subur. Demikian juga dialog yang dibangun oleh pengurus Gereja membuka jalan baru menuju pada keterbukaan

masing-masing pihak. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 26 bulan Desember 2005, Gereja dapat dipakai kembali dan diperbolehkan untuk beribadah di Gereja sampai sekarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang tampak maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana proses rekonsiliasi GITJ Karang Subur dan masyarakat sekitarnya terjadi?
2. Mengapa bisa terjadi rekonsiliasi?
3. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa dipelajari dari proses rekonsiliasi tersebut?

Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka saya memilih topik bagi tesis saya ini dengan :

UPAYA REKONSILIASI ANTAR UMAT BERAGAMA OLEH GEREJA INJILI DI TANAH JAWA (GITJ) KARANG SUBUR

C. Batasan masalah

Penulisan tesis ini, penulis membatasi penulisan tesis ini berkenaan dengan masalah diatas. Penulis menfokuskan pada tataran proses terjadinya kerukunan antar komunitas umat beragama. Kedua, menganalisa bagaimana dampak rekonsiliasi komunitas umat beragama yang dibangun oleh masing-masing pihak baik pengurus gereja maupun pihak muslim di wilayah Karang Subur. Ketiga, proses penulisan tesis ini hanya di wilayah GITJ Karangsubur.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui hubungan antar umat beragama dalam menjalankan kebebasan beragama sehingga sampai terjadinya konflik tersebut.
2. Mendiskripsikan rekonsiliasi komunitas agama yang terjadi di GITJ Karang Subur pepanthen GITJ Tanjungrejo di Kabupaten Kudus.
3. Menjelaskan bagaimana relevansinya terhadap pluralitas agama sehingga mereka bisa hidup berdampingan kembali tanpa ada prasangka negatif berkenaan dalam menjalankan kebebasan beragama.

E. Metodologi

Dalam pemaparan tulisan thesis ini, berkenaan dengan permasalahan yang terjadi diatas, penulis meneliti atau menganalisa berdasarkan metode penelitian literatur atau studi pustaka. Metode studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan.¹⁷ Sebab fenomena yang diteliti atau dianalisa adalah fenomena yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini, sehingga dalam pengumpulan data-data diambil dari buku-buku literatur. Meskipun demikian, selain dari buku-buku sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, juga dikumpulkan dari pengalaman langsung seperti wawancara untuk memberikan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang berkaitan atau senada dengan penulisan thesis ini. Semua data yang dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

¹⁷ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 45.

dirumuskan ide yang disarankan oleh data.¹⁸ Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis disini menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi dan-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut.

Dalam hal ini, penulis juga meneliti berdasarkan landasan teori untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan yang sudah di ungkapkan oleh penulis. Maka teori-teori yang dipakai oleh penulis untuk menerangkan data tersebut antara lain *pertama* analisa teori dalam menganalisa konflik, sehingga akan mengetahui sesungguhnya konflik atau kekerasan yang telah terjadi. Teori konflik tersebut untuk mengkaji konflik yang terjadi antara masyarakat yang beragama Kristen dan Islam di dukuh Karang Subur. *Kedua*, penulis menggunakan teori transformasi konflik dalam menganalisa upaya yang telah dilakukan oleh pengurus gereja untuk menyelesaikan permasalahannya dengan warga masyarakat di sekitar dukuh Karang subur. Analisa tersebut berdasarkan pada kajian upaya yang dilakukan oleh pengurus gereja dengan masyarakat sekitar di dukuh Karang Subur, pasca penutupan gereja dan pelarangan untuk beribadah di gereja. *Ketiga*, penulis menggunakan analisa teori rekonsiliasi dalam kerangka membangun dan memulihkan kembali hubungan dalam masyarakat yang terkait dengan konflik. Kajian ini berdasarkan pada tataran rekonsiliasi yang dilakukan oleh pengurus gereja bersama dengan masyarakat di dukuh Karang Subur.

Berkenaan dengan teori-teori diatas, untuk menjelaskan lebih jauh apa yang telah dikembangkan dan diupayakan dalam membangun kerukunan antar komunitas beragama di dukuh Karang Subur. Teori -teori yang telah disebutkan diatas adalah

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002, hal. 103

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal 18.

upaya penulis untuk memperdalam analisis topik penulisan thesis. Karena teori tersebut berkenaan dengan rekonsiliasi yang terjadi di dukuh Karang Subur dalam membangun perdamaian jangka panjang, maka teori tersebut sangatlah relevan dengan topik bahasan thesis penulis. Dan penulis berharap bahwa teori-teori tersebut diatas dapat membantu penulis walaupun masing-masing teori memiliki kelebihan tersendiri dalam menganalisa bagian-bagian tertentu dari realitas. Sehingga penulis dapat menjawab dari apa yang telah dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan dirumusan masalah yaitu (1). Bagaimanakah proses rekonsiliasi antara GITJ Karang Subur dan masyarakat di sekitarnya terjadi? (2). Mengapa bisa rekonsiliasi? (3). Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari proses rekonsiliasi tersebut?

F. Hipotesa Masalah

Berdasarkan kerangka yang dibangun, maka hipotesanya adalah jika upaya rekonsiliasi antar umat beragama oleh GITJ Karang Subur untuk dapat hidup berdampingan kembali tanpa ada prasangka negatif berkenaan dengan menjalankan kebebasan beragama. Maka hipotesanya antara lain :

1. Rekonsiliasi dapat terjadi apabila ada pendekatan-pendekatan dan dialog secara konkret diantara para pemimpin tokoh agama Kristen maupun Islam.
2. Rekonsiliasi dapat terjadi apabila gereja bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam memperhatikan terhadap masalah sosial untuk mengatasi kesulitan di dukuh Karang Subur.
3. Rekonsiliasi dapat terjadi apabila kearifan budaya lokal dipakai sebagai alat perekat untuk kerukunan umat beragama.
4. Rekonsiliasi dapat terjadi apabila adanya pengampunan dari kedua belah pihak.

Maka upaya yang sudah dibangun oleh pengurus gereja dan warga muslim dalam proses pengembangan perdamaian mencerminkan kehidupan sosial yang humanis dan berkeadilan.

G. Sitematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab. Dengan demikian pemaparan dalam thesis ini diuraikan dengan kerangka sistematika penulisan berikut ini:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang penelitian, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesa, metodologi penulisan, dan sistematika penulisannya.

Sementara bab kedua, penulis akan menulis selang pandang GITJ Karang Subur di semenanjung Muria. Dalam pembahasan bab dua ini, penulis akan menjelaskan siapa GITJ secara umum dan sejarahnya. Penulis akan mendiskripsikan siapa GITJ Karang Subur dan sejarahnya, kemudian menjelaskan tentang demografi wilayah dukuh Karang subur.

Pada bab III yang menjadi fokus pembahasan adalah eksplorasi hasil penelitian yang dilakukan. Baik data yang bersumber dari kepustakaan, maupun data hasil interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini. Bab III akan mendeskripsikan, membedah dan menganalisa tiga persoalan yang menjadi bahasan dalam bab ini. Pertama, analisa konflik yang terjadi di dukuh Karang Subur. Kedua, upaya pengurus gereja dalam rekonsiliasi. Ketiga, moment rekonsiliasi.

Bab IV merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang telah digambarkan dalam bab III. Di dalamnya akan dibahas analisis rekonsiliasi di GITJ Karang Subur. Karya ini akan dipungkasi dengan bab penutup yang berisi kesimpulan, sara serta penutup pada bab V.

© UKDW

BAB V P E N U T U P

Bagian akhir ini merupakan kesimpulan akhir dari hasil analisa penelitian di dukuh Karang Subur, desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Penelitian tersebut berkaitan dengan persoalan yang terjadi di GITJ Karang Subur dengan masyarakat sekitarnya. Persoalan yang terjadi adalah konflik sosial keagamaan di dukuh Karang Subur. Konfliknya adalah penutupan Gereja sebagai tempat ibadah. Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisa suatu proses upaya warga Gereja dalam mengatasi konflik tersebut sampai rekonsiliasi serta Gereja dapat dipakai kembali sebagai tempat ibadah. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bagian thesis ini yaitu :

Pertama, secara konteks sejarah GITJ maupun Gereja GITJ Karang Subur, muncul dan berkembang di wilayah tertentu, dalam konteks historis yang unik dan di tengah-tengah masyarakat dan kebudayaan yang unik pula. Di semenanjung Muria GITJ berdiri dan berkembang termasuk GITJ Karang Subur

Kedua, Pengurus gereja dalam menyelesaikan konflik penutupan dan pelarangan gereja sebagai tempat ibadah. Ternyata hasil jerih lelah mereka membuahkan hasil sampai pada tataran rekonsiliasi. Proses terjadinya rekonsiliasi karena adanya sikap saling terbuka dan saling percaya. Mereka dapat merekonstruksi relasi sosial paska konflik. Mereka dapat berdialog secara aktual dan realitis dalam mensikapi persoalan-persoalan sosial. Mereka terbuka antara satu dengan yang lainnya tanpa dibatasi dengan perbedaan dan mau secara terbuka keluar dari sikap fanatisme dan sikap eksklusif.

Ketiga, Rekonsiliasi kedua belah pihak antara orang-orang Kristen dan Islam terjadi karena adanya pengampunan dan pemafaan; kejujuran keterbukaan batin dan berlapang dada; serta ada tindakan konkret dalam sikap sesuai apa yang ada dalam batin mereka. Rekonsiliasi adalah pemulihan harkat kemanusiaan yang telah dirusakkan oleh peristiwa-peristiwa traumatis dan sebuah proses merekonstruksi tatanan moral dari sebuah masyarakat.

Dalam mewujudkan rekonsiliasi, ada berbagai upaya yang ditempuh oleh mereka. Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa tahapan sebagai bentuk upaya serta peran yang dilakukan oleh warga Kristen di Karang Subur dalam mewujudkan jalan hidup yang damai.

A. Langkah Positif

Ada beberapa langkah yang positif yang dilakukan oleh GITJ Karang Subur dalam mengupayakan rekonsiliasi di dukuh Karang Subur. Langkah positif tersebut adalah :

Pertama, mereka bersedia terbuka untuk saling berinteraksi dalam dialog antar manusia. Hubungan pribadi menjadi prinsip utama dan merupakan jembatan paling manusiawi untuk memahami makna integritas seseorang dan sekaligus menghargai integritas agama yang diyakininya.

Kedua, mereka dimampukan untuk mengasihi. Rasa benci, amarah dan dendam tidak membelenggu kepribadiannya. Bahkan dalam pengakuan mereka (warga Kristen) tidak memiliki rasa kebencian, amarah dan balas dendam terhadap pihak-pihak (warga non Kristen) yang telah ikut dalam kejadian itu (penutupan Gereja). Rasa kasih yang dimiliki oleh mereka membawa kepada jalan hidup damai. Kebencian dan balas dendam justru jalan yang menuju pada kehancuran. Permusuhan akan semakin tumbuh dalam diri mereka. Konflikpun tidak akan pernah selesai.

Hanya dengan restorasi kasih maka rekonsiliasi dapat diwujudkan. Mereka dapat menjalin kembali hubungan yang selama ini rusak, karena restorasi kasih membawa pemulihan dan pembaharuan.

Ketiga, adanya pengampunan dan kelapangan hati. Masing-masing pihak yang terluka dapat dipulihkan dan disembuhkan karena mereka saling memaafkan dan mengampuni. Mereka dapat saling menerima kondisi mereka sebagaimana adanya. Kelapangan hati yang menuntun mereka pada jalan hidup yang damai. Walaupun pengampunan adalah proses. Namun pada akhirnya rekonsiliasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya. Semua yang luka mengalami pemulihan.

Keempat, komitmen untuk rekonsiliasi. Berkaitan dengan komitmen untuk rekonsiliasi perlu menyadari bahwa komitmen tersebut tidak akan pernah terwujud jika semua pihak mengabaikan proses pengampunan. Pengampunan adalah kebajikan untuk memungkinkan praktik rekonsiliasi. Jalan yang terbaik untuk mengobati luka-luka fisik dan batin yang terjadi dalam komunitas yang terlibat dalam konflik adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Pada proses inilah pihak-pihak yang berkonflik diingatkan kembali pada masa lalu supaya tidak mengulangi kembali sikap perbuatan yang tidak baik karena pengampunan tidak pernah berarti melupakan masa lalu. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan tumbuh kesadaran untuk menolak upaya balas dendam dan kebencian. Pengampunan terjadi karena terhapusnya dendam dan kebencian dalam diri mereka. Maka pelaku kejahatan mengalami pertobatan dari tindakan masa lalu sedangkan korban dipulihkan kembali. Pasti akan mengalami restorasi hubungan yang rusak dan rekonsiliasi terwujud dengan nyata.

Kelima, adanya dukungan pihak ketiga yang netral seperti Ketua Tahmir Masjid dan tokoh agama Muslim di desa Klaling. Proses rekonsiliasi di Karang Subur dapat diwujudkan karena ada campur tangan pihak ketiga yang netral. Rekonsiliasi

terwujud karena pihak ketiga mampu menjadi mediator yang baik. Justru dalam mediasi, mereka mengharapkan untuk hidup rukun dan sekaligus mereka ini sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat dan umat Islam. Dengan demikian mereka dapat membangun kekuatan komunitas dalam mendukung kondisi yang kondusif, hidup rukun serta keadilan tanpa tindakan represif.

Keenam, bekerjasama dalam memperhatikan masalah sosial di dalam masyarakat dan menjalin hubungan dengan warga masyarakat. Dalam hal ini, Gereja peduli terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh warga setempat dan peka terhadap masalah-masalah sosial. Gereja melayani dan membantu masyarakat tanpa label atau membeda-bedakan agama. Dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh GITJ Karang Subur, gereja mempunyai kesediaan untuk terbuka antara satu dengan lainnya. Dengan demikian gereja tidak menjadi eksklusif dan berjuang untuk menghindari eksklusifisme (semata-mata untuk kepentingan diri sendiri). Kepedulian Gereja terhadap kesulitan masyarakat ternyata dapat membuka jalan dalam menyelesaikan masalah konflik sosial keagamaan di dukuh Karang Subur. Sikap menolong dan membantu warga masyarakat di dukuh Karang Subur bukanlah sebuah proyek kristenisasi tetapi tindakan yang didasari oleh sikap sungguh-sungguh secara tulus tanpa tendensi kepentingan. Sikap semacam itu ternyata mendorong warga masyarakat di dukuh Karang Subur untuk saling bergandengan tangan dan bekerjasama dalam mengatasi kesulitan secara bersama-sama.

B. Harapan Ke Depan

Ada beberapa langkah ke depan yang harus dilakukan oleh GITJ Karang Subur ketika rekonsiliasi sudah terjadi di dukuh Karang Subur. Penulis dapat menyimpulkan yaitu :

Pertama, melakukan penyadaran terhadap masyarakat secara umum. Hal ini harus selalu dilakukan supaya tidak terjadi kembali tindakan represif, eksploitasi, penetrasi, segmentasi maupun marginalisasi. Semua pihak harus melakukan penyadaran dalam suatu komunitas masyarakat. Penyadaran di tingkat masyarakat bertujuan menghargai hak-hak asasi manusia, persamaan hak, otonomi, integritas, solidaritas dan partisipasi. Penyadaran ini bisa dilakukan melalui pengajaran di dalam PA (Pendalaman Alkitab) atau kotbah di Gereja serta dakwah di Masjid maupun dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat formal yang berupa ajakan untuk hidup rukun.

Kedua, bekerja sama dengan komunitas masyarakat di akar rumput. Dalam membangun kerja sama tentu ada dialog, walaupun yang sudah dilakukan oleh pengurus Gereja adalah berkomunikasi secara terbuka dan hanya dalam ruang lingkup pemimpin agama saja. Pihak gereja harus membangun jaringan di ruang lingkup akar rumput supaya ke depan nanti tercipta masyarakat yang humanis dan berkeadilan. Misalnya membentuk wadah dialog antar umat beragama di dukuh Karang Subur.

Ketiga, mengembangkan pemberdayaan guna sumber daya alam secara bersama-sama dalam menghadapi kesulitan warga, misalnya pengembangan air bersih yang sudah ada ditingkatkan lagi.

Keempat, mengatasi persoalan ekonomi warga, misalnya membentuk kelompok tani ternak karena wilayah Karang Subur memiliki potensi alam yang dapat menyediakan pakan ternak yang melimpah serta membentuk kelompok usaha kue skala rumah tangga yang dapat dipasarkan ke pasar tradisional terdekat maupun swalayan karena kota Kudus adalah kota industri.

Kelima, memperhatikan dan peduli terhadap masalah sosial sehingga dapat membangun partisipasi/kerjasama, solidaritas dan persamaan tanpa membeda-

bedakan. Misalnya bersama-sama mengatasi pemuda-pemuda yang sering mabuk serta ikut jaga dalam ronda untuk keamanan dusun di Karang Subur.

Keenam, jangan meninggalkan kultur tradisional Jawa yang sering dilaksanakan oleh warga maupun pemerintah desa, misalnya sedekah bumi yang sering dilaksanakan setiap tahunnya, serta budaya hajatan atau selamatan yang sering dilakukan oleh warga di Karang Subur.

Ketujuh, ikut serta dan ambil bagian dalam pengembangan masyarakat di dukuh Karang Subur sesuai dengan kemampuan dan kekuatan Gereja dalam membangun desa.

© UKDWN

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2000.
- _____, Alquran, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.
- _____, *Buku Data Kependudukan Kecamatan Jekulo*, Tahun 2003-2008.
- _____, “Rekonsiliasi” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- _____, *Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1999.
- _____, *Perspektif Teologi dan Praksis: Perempuan, Konflik dan Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Pusat Studi Feminis UKDW, 2004.
- Appleby, R. Scott. *The Ambivalence of The Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*, Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Audah, Ali. “afw” dalam *Konkordasi Quran: Panduan Kata dalam Mencari ayat Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Augsburger, David. *Freedom Forgiveness*, diterjemahkan Christine Sujana. *Bebas Mengampuni*. Bandung: Kalam Hidup, 1998.
- Augsburger, David. *Helping People Forgive*. Louisville, Kuntucky: Westminster/Jhon Knox Press, 1996.
- Augsburger, David. *The New Freedom of Forgiveness*, 3rd edition Chicago: Moody Press. 2000.
- Bamualim, Chaider S. *Agama, Konflik dan Etika Dialog*, CSRC UIN: Jakarta, 2009.
- Beaty, Andrew. *Varieties of Javanese Religion: An Antropological Account*, University Press: Cambridge, 1992.
- Berkhof, H. dan I.H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Bisri, Adul. dan Munawur, “ *al-shafh*” dalam *Kamus Indonesia – Arab*. Jakarta: Pustaka Progressif, 1999.
- Boraine, Alex. Janet Levy, and Ronell Scheffer (eds.), *Dealing with the Past: Truth and Reconcilliation in South Africa*, Capetown:IDASA, 1994.

- Bronkhorst, Daan. *Truth and Reconciliation: Obstacles and Opportunities for Human Right*, Amsterdam: Amnesty International, 1995.
- Browning, Robert L. dan Roy A. Reed, *Forgiveness, Reconciliation, and Moral Courage: Motive and Desires for Ministry in a Troubled World*. Chicago: William B. Eerdmans Publishing Company, 2004.
- Douglas, Jack D. dan Frances Chaput Waksler, “Kekerasan”, dalam Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- End, Thomas Van Den. *Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Enright, Robert D. dan Joanna North, *Exploring Forgiveness*, Chicago: University of Wisconsin Press, 1998.
- Enright, Robert D. *Forgiveness Is a Choice: A Step-by-Step Process for Resolving Anger and Restoring Hope*, Chicago: American Psychological Association, 2001.
- Fachruddin, H. “Maaf” dalam *Ensiklopedia Al-Qur’an*, Jil. 2: M-Z, Jakarta: Rineksa Cipta, 1992.
- Fisher, Ronald J. “Social-Psychological Processes in Interactive Conflict Analysis and Reconciliation,” dalam, *Reconciliation, Justice and Coexistence: Theory and Practice*, editor Mohammed Abu Nimer. Maryland: Lexington Books, 2001.
- Fisher, Simon et.al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: British Council. 2001.
- Freud, Sigmund, *The Ego and Id*, New York: Norton, 1960.
- Galtung, Johan “After Violence, Reconstruction, Reconciliation and Resolution: Coping with Visible and Invisible effects of War and Violence” dalam, *Reconciliation, Justice and Coexistence: Theory and Practice*, editor Mohammed Abu Nimer. Maryland: Lexington Books, 2001.
- Galtung, Johan. *Dialogues as Development, Methodology and Development*, Copenhagen: Ejlers, 1988.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Perubahan*, Pustaka Eureka: Surabaya, 2003.
- Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, Columbia University Press, New York, 1998.
- Heffebower, Duane Ruth *Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi*, Edisi II, Yogyakarta, 2000.

- Heffelbower, Duane Ruth. *Conflict and Peacemaking Across Cultures: Training For Trainers*, Fresno CA: Fresno Pacific University, 1999.
- Hege, Christian and Christian Neff. *Mennonitisches Lexikon*, 4 vols. Frankfurt & Weierhof: Hege; Karlsruhe; Schneider, 1987.
- Hilmar Farid, "Political economy of violence and victim in Indonesia" dalam, *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, representation, resolution*, editor Charles A. Coppel, New York: Routledge, 2007.
- Hoekema, A. G. "Pieter Jansz (1820-1904): First Mennonite Missionary to Java." *Mennonite Quarterly Review*, tk, tp, 1957.
- Hoekema, A.G. "Kyai Ibrahim Tunggul Wulung (1800-1885)." *Apollos Jawa*, Semarang: Peninjau, 1985.
- Jamil, M. Mukshin. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Jeong, Ho Won. *Peace And Conflict Studies An Introduction*, Burlington: ashgate Publishing Company, 2000.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pegakuan, Diskursus agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*, Semarang: Resail, 2009.
- Kraybill, Ronald S. From Head to Heart: The Cycle of Reconciliation. *Conciliation Quarterly*, vol. 7, dalam Mohammed Abu Nimer, *Reconcilliation, Justice and Coexistence: Theory and Practice*, Maryland: Lexington Books, 2001.
- Kraybill, Ronald S., Alice Fracer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill: Panduan Mediator, Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta: KANISIUS, 2002.
- Kumaat, Martati Insuhardig. *Sejarah Singkat GITJ*, Pati: AKWW, 1980.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002.
- Lorenz, Konrad, *On Agression* (tej. Marjorie Kerr Wilson), New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1966.
- M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Macclver, Robert. *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1950.
- Marshall, Joretta L. *Faithquestions: How Can I Forgive?* Diterjemahkan Yahya Adinegoro. *Serial Iman: Suatu Studi Tentang Pengampunan*, Surabaya: Majesty Books Publisher, 2005.

- Miller, Lynn H. *Global Order, Values and Power in Interational Politics*, Colorado, Westview, 1998.
- Montville, Joseph V. *The Healing Function in Political Conflict Resolution. In Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application*. D.J.D Sandole, and H. van der Merwe, eds. Manchester, U.K: Manchester University Press, 1993.
- Naipospos, Bonar Tigor (ed). *Tunduk Pada Penghakiman Massa: Pembenaran Negara atas Persekusi terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Setara Institute, 2007.
- Pruitt, Dean G. dan Sung Hee Kim, *Social Conflict: Escalation, stalemate and settlement*, New York: McGraw Hill, 2004.
- Qolay, A. Hamid Hasan. “Maaf” dalam *Indeks Terjemahan Al-Quran – Karim*, Jil. 3. Jakarta: Yayasan Halimatus – Sa’diyyah, 2000.
- Quanbeck, W.A. *Forgiveness* di dalam *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*. Vol. 2, Nashville: Abingdon Press, 1962.
- Samuel Huntington, *The Clash and the Remaking of World Order*, diterjemahkan oleh: M. Sadat Ismail, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Schreiter, Robert J. *Pelayanan Rekonsiliasi: Spiritualitas dan Strategi*, Flores: NUSA INDAH, 2001.
- Schumann, Olaf H. *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Shenk, David W. dan Badru D. Kateregga, *A Muslim and a Christian Dialogue*, diterjemahkan oleh Diah Sri Utami, *Dialog Islam dan Kristen*, Semarang: PANJI GRAHA, 2009.
- Shenk, David W. *Journey of the Muslim Nation and the Christian Church: Exploring the Mission of the Communities*, Pennsylvania: Herald Press, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shriver, Donald W. Jr., *An Ethics For Enemies: Forgiveness in Politics*, Oxford: Oxford University Press. 1995.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman & Politik Dalam era Reformasi di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2001.
- Soekotjo, S.H dan Lawrence M.Yoder, *Mengalir Mencari Alur: Sejarah Gereja Injili Di Tanah Jawa*. Pati: Sinode GITJ, 2002.

- Sunarto, Ahmad. “*al-shafh*” dalam *Kamus Al-fikri: Indonesia-Arab-Ingris – Arab-Ingris-Indonesia*, Surabaya: Halim Jaya, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suseno, Franz Magnis. *Dialog Antar Agama di Jalan buntu? dalam Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Toews, Barb. *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships.*, USA: Good Books, 2006.
- Toulmin, Stephen. *Cosmopolis, The Hidden Agenda of Modernity*, New York: The Free Press, 1990.
- Vanlent, J. “*Pardon and Forgiveness*” dalam *The Encyclopedia of Islam New Edition: Glossary and Index of Technical Terms*. Vol. 1-8, edited: P.J. Bearman. Netherlands: Brill, 1997.
- Vine, W.E., Merrill F. Unger, William White, “*Forgive*” dalam *Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words*, Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985.
- Wehr, Hans. “*al-afw*” dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Edited: J. Milton Cowan, Wiesbaden: OTTO HARRASSOWITZ, 1996.
- Winslade, John. dan Gerald Monk, *Narative Mediation : A new Approach to Conflict Resolution*, San francisco: Jossey-Bass Publisher, 2001.
- Woodward, Kathryn. *Identity and Defference*, Sage Publications, London, 1997.
- Yarbrough, R.W. “*Forgivness and Reconciliation*,” di dalam *New Dictionary of Biblical Theology*, Nashville: Inter Varsity Press, 2000.
- Yoder, Lawrence M. "Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ)." *Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Vol. 5*, Pennsylvania: Herald Press. 1990.
- Yoder, Lawrence M. dan S.H. Sukoco, *Sejarah Gereja Injili di Tanah Jawa : Tata Injil di Bumi Muria*, Semarang: Pustaka Muria, 2010.
- Zehr, Howard *The Little Book of Restorative Justice*, Pensilvania: Good Books, 2002.

Makalah dan Artikel

- Abdala, Ulil Abshar. *Ekologi Konflik Agama-Agama di Indonesia: Menuju Rekonsiliasi atau Konflik Berkepanjangan*, dalam dalam Einar M Sitompul, *Agama-Agama Kekerasan dan Perdamaian*, Marturia PGI, Jakarta, 2005.

- Haryatmoko, *Agama: Etika Atasi Kekerasan*, dalam *Harian Kompas*, edisi 17 April 2000.
- Haryatmoko, *Telaah Historis Negara Kesejahteraan*, *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No 3: 1998.
- Kriesberg, Louis “Paths to Varieties of Intercommunal Reconciliation.” Paper presented to the Seventeenth General Conference, International Peace Research Association, Durban, South Africa, 22-26 Juni 1998.
- kumpulan naskah seminar, *150 Tahun Napak Tilas Jejak Pieter Jansz*, Panitia Napak Tilas 150 tahun Pieter Jansz: Jepara, 2001.
- Kumpulan naskah seminar, *Mengenal GITJ Dari Dekat*, Sinode GITJ: Pati, 2004.
- Naharong, Abdul Muis. *Kekerasan dan Teror Suci*, dalam *Jurnal Falsafah dan Agama*, Vol. 1, No. 1, April 2007, Jakarta: PS Falsafah dan Agama Universitas Paramadina.
- Paimoen, Eddy “Kompleksitas Hubungan Agama dan Kekerasan Pengalaman Kristen di Indonesia,” dalam *Agama-agama: Kekerasan dan Perdamaian*, editor: Einar M. Sitompul, Jakarta: Marturia PGI, 2005.
- Singgih, Emanuel Gerrit. “Globalization and Contextualization: Toward a New Awareness of Ones’s Own Reality”, dalam Sientje Merentek Abram. *Doing Theology in Indonesia: Sketches for An Indonesian Contextual Theology*, ATESEA, Occasional Paper No. 14, Manila, 2003.
- Suratno, *Agama, Kekerasan dan Filsafat: Kekerasan Teologis Dalam Perspektif Filosofis*, *Jurnal Falsafah dan Agama*, Edisi: Agama dan Kekerasan, Vol. 1, No. 1, April 2007, Jakarta: PS Falsafah dan Agama Universitas Paramadina.
- Th. Sumartana, *Mata Rantai dan Struktur-Struktur Kekerasan di Indonesia*, dalam Seminar Agama-Agama yang ke XIX di Sakatiga dengan tema “Agama-Agama, Kekerasan dan Perdamaian, 12 – 17 September 1999.
- Widjaya, Paulus Sugeng. *Rekonsiliasi Antar Umat Beragama: Refleksi Pengalaman Lapangan*. Makalah seminar Pelatihan Pemberdayaan untuk Perdamaian Poso, 16-19 April 2002 di Palu.
- Yewangoe, A.A. *Kekerasan Struktur dan Kultur Serta Akibat-Akibatnya*, dalam Einar M Sitompul, *Agama-Agama Kekerasan dan Perdamaian*, Marturia PGI, Jakarta, 2005.

Internet

- Mulia, Siti Musdah, “Potret Kebebasan dan berkeyakinan di Era Reformasi, Makalah disajikan pada lokakarya Nasional Komnas Ham *Penegakan HAM dalam*

10 Tahun Reformasi, di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008, 8-10, <http://www.jcrp-online.org/wmprint.php?ArtID=240> diakses pada 19 Agustus 2009.

_____, *Jekulo: Kudus* dalam Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedi bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Jekulo,Kudus>. Tanggal akses 10 Agustus 2009

Mh, Nurul Huda. *Laporan Kebebasan Beragama International 2005* (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat). Di keluarkan oleh Kantor Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh. Diterbitkan pada tanggal 8 November 2005, <http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/29/laporan-kebebasan-beragama-internasional-2005/>.

Dokumen-Dokumen

Akta Sidang Patunggilan I, 29 – 30 Mei 1940 di Kelet

Akta Sidang Patunggilan II, 27 – 28 Mei 1941 di Kedung Penjalin

Akta Sidang Patunggilan III, 20 Oktober 1945 di Pati.

Akta Sidang Patunggilan IV, 18 Mei 1948 di Kedung Penjalin.

Akta Sidang Patunggilan V, 28 – 30 Juni 1949 di Pati.

Doopsgezinde Zendingsvereniging, *Verlag van de Staat en de Verrigtingen der Doopsgezinde Vereeniging to Bevordering der Evangelieverbreiding in di Nederlandsche Overzeesche Bezittingen* the annual reports of the Dutch Mennonite Mission Union published in Amsterdam beginning in 1848.



Wawancara

Bp. Adi Waluya selaku Pendeta di GITJ Tanjungrejo, pada tanggal 5 Juni 2009.

Bp. Mohamad Adjis selaku Ketua Takmir Masjid, pada tanggal 4 Juni 2009.

Bp Sanusi sebagai tokoh agama Islam, pada tanggal 5 juni 2009.

Bp. Karjan dan ibu Suminem pada tanggal 5 juni 2009

Bp. Kristianto selaku Majelis GITJ Karang Subur, pada tanggal 6 Juni 2009.

Bp. Suwarno selaku Guru Injil GITJ Karang Subur, pada tanggal 6 Juni 2009.